

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia sangat mengandalkan penerimaan negara yang sebagian besar bersumber dari sektor perpajakan. Pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagai sarana redistribusi pendapatan yang menjadi alat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Sejalan dengan peran tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kontribusi sektor pajak sebagai pendapatan negara, terutama dari jenis pajak yang bersifat konsumtif seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN merupakan salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan pajak Indonesia yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemungutan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dikukuhkan secara resmi oleh otoritas pajak. PKP merupakan subjek penting dalam siklus administrasi perpajakan karena bertugas memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN dari transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Namun dalam praktiknya penerimaan PPN masih menemui berbagai tantangan, salah satunya yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya proses administrasi perpajakan, termasuk dalam prosedur pengukuhan PKP. Sedangkan pengukuhan PKP merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap pelaku usaha yang memenuhi syarat formal dan material telah terdaftar sebagai pemungut pajak.

Secara teoritis, pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011:1), merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini juga ditegaskan oleh Suparmono (2010:2) dan Damayanti (2010:2) yang menyatakan bahwa pajak tidak memberikan timbal balik langsung, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Dalam hal kelembagaannya, pelaksanaan administrasi dan pelayanan perpajakan di Indonesia dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP bertanggung jawab atas pengelolaan sistem perpajakan nasional, termasuk pengawasan dan pelayanan wajib pajak, serta pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada efisiensi dan keadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 yang telah diperbarui dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2020, dilakukan penataan ulang organisasi instansi vertikal DJP untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, termasuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai daerah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) merupakan unit kerja vertikal DJP yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada wajib pajak di wilayah kerjanya, termasuk di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu KPP Pratama yang memiliki peran strategis adalah KPP Pratama Batang, dimana melayani pelaku usaha dan masyarakat yang mencakup wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan PPN, KPP Pratama Batang memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa prosedur permohonan pengukuhan PKP dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berkenaan dengan hal ini, CV. XYZ selaku perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah KPP Pratama Batang yang bergerak di bidang jasa outsourcing. Sebagai Perusahaan jasa, kegiatan usaha CV. XYZ termasuk dalam kategori Jassa Kena Pajak (JKP) yang wajib

dikenai PPN apabila telah memenuhi kriteria sebagai PKP. Oleh karena itu, pengukuhan sebagai PKP bagi CV. XYZ menjadi langkah administratif yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung transparansi serta kepatuhan fiskal.

Namun dalam praktiknya, proses permohonan pengukuhan PKP seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi administratif, pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, maupun dari sisi teknis pelaksanaan oleh pihak otoritas pajak. Hal ini menjadi penting untuk diketahui terkait efektivitas implementasi prosedur, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi baik oleh pihak wajib pajak maupun otoritas pajak.

Dengan demikian, penulisan ini dilakukan untuk mempelajari secara mendalam mengenai **PROSEDUR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA CV. XYZ (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG)**, dengan harapan dapat memberikan gambaran secara empiris mengenai efektivitas pelaksanaan prosedur serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, ruang lingkup penulisan tugas akhir ini dapat dirumuskan dengan mengacu pada beberapa hal berikut:

1. Gambaran Umum Perpajakan
2. Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Gambaran Umum Pengusaha Kena Pajak (PKP)
4. Teori Alur Pelaporan dan Pengukuhan PKP
5. Latar Belakang Pengukuhan PKP CV. XYZ
6. Prosedur Pengukuhan PKP CV. XYZ di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang
7. Kewajiban Setelah Pengukuhan PKP
8. Keuntungan Pengukuhan PKP
9. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengajuan Pengukuhan PKP CV. XYZ

10. Perbedaan Teori dan Praktik Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pada CV. XYZ

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam setiap laporan, penting untuk didasari dengan tujuan dan kegunaan dari penulisan laporan agar dapat memberikan pemahaman yang jelas dan lebih komprehensif mengenai topik yang dibahas.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berikut merupakan tujuan dari penulisan laporan berdasarkan latar belakang dan ruang lingkupnya, antara lain:

1. Menjelaskan secara sistematis dokumen dan/atau persyaratan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Menganalisis dasar hukum yang mengatur mengenai pengukuhan PKP dalam sistem perpajakan di Indonesia.
3. Menguraikan proses permohonan pengukuhan PKP CV. XYZ.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pengukuhan PKP.
5. Mengetahui tahap penyelesaian kendala pengukuhan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.
6. Memaparkan keuntungan dilakukannya pengukuhan PKP.
7. Meninjau pelaksanaan kewajiban setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan laporan ini bagi berbagai pihak yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang

- a. Menyediakan referensi tambahan mengenai pemahaman wajib pajak terkait persyaratan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- b. Membantu dalam mengevaluasi sosialisasi kebijakan perpajakan kepada Masyarakat.

- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan layanan dan prosedur administrasi pengukuhan PKP.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi akademik dalam memahami aspek hukum dan administrasi pengukuhan PKP.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. Bagi Universitas

- a. Dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam proses pembelajaran di bidang perpajakan.
- b. Mendorong pengembangan riset dan kajian akademik mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia.
- c. Membantu dalam penyusunan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri dan peraturan perpajakan terbaru.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Penulisan tugas akhir ini didasarkan dari berbagai jenis data yang diperoleh dan metode pengumpulan data yang dapat mendukung pemenuhan penulisannya.

1.4.1 Jenis-Jenis Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini, memerlukan informasi yang memadai serta berbagai data untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari objek penelitian atau ditemukan langsung oleh peneliti, data primer dapat berupa observasi, wawancara, dan survei data. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data primer melalui survei data dan melakukan wawancara langsung kepada petugas pajak yang

ditugaskan melakukan survei lapangan Pengusaha Kena Pajak CV. XYZ.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber ketiga dengan memastikan keakuratannya, dapat berupa artikel, jurnal, buku, laporan, dan lain sebagainya. Pada penulisan ini, data sekunder yang digunakan bersumber dari dokumen resmi pihak KPP Pratama Batang dan beberapa artikel yang bersumber dari lingkup Direktorat Jenderal Pajak.

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prosedur permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada CV. XYZ yang berhubungan langsung dengan kebijakan dan praktik pelayanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Pengamatan Langsung (Observasi)

Metode pengamatan langsung adalah metode yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam metode ini, observasi dilakukan terhadap proses administrasi dan alur pelayanan pengukuhan PKP.

2. Wawancara Mendalam

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan proses tanya jawab kepada narasumber atau informan terkait topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam hal ini, wawancara dilakukan secara terstruktur kepada narasumber yang terlibat dalam proses pengukuhan PKP, seperti pegawai KPP Pratama

Batang yang langsung melakukan visitasi pada perusahaan yang dijadikan studi kasus, dan perwakilan dari CV. XYZ.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, arsip, laporan, atau catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap dokumen seperti formulir permohonan PKP, SOP internal KPP, serta regulasi perpajakan terkait pengukuhan PKP, yang kemudian dilakukan analisis untuk memperkuat temuan lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bagian utama yang telah disusun sedemikian rupa secara sistematis dan logis. Pada bagian awal mencakup halaman sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Terdapat 4 (empat) bab yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, BAB III Pembahasan, dan BAB IV Penutup. Pada BAB I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Pada BAB II Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, menjelaskan mengenai sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, visi, misi, dan tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, serta tugas dan wewenang pagian. Pada BAB III Pembahasan, menjelaskan mengenai gambaran umum perpajakan, landasan hukum dan teori, gambaran umum Pengusaha Kena Pajak, prosedur pengukuhan PKP, dan studi kasus yang meliputi latar belakang permohonan pengukuhan PKP CV. XYZ, keharusan/ kewajiban pengukuhan PKP CV. XYZ, syarat/ dokumen pengukuhan PKP CV. XYZ, prosedur pengukuhan PKP CV. XYZ, tahapan setelah pengukuhan PKP CV.

XYZ, kewajiban CV. XYZ setelah pengukuhan PKP, serta keuntungan pengukuhan PKP, kendala yang dialami petugas PKP, permasalahan yang dihadapi wajib pajak, dan penyelesaian kendala pengukuhan PKP. Pada BAB IV Penutup, menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran sehubungan dengan pembahasan topik pada Bab III.